



# LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

## KATA PENGANTAR

---

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah sebagai dokumen evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk memberikan sekilas gambaran tentang hasil pelaksanaan program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Disadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan, namun demikian sudah memungkinkan untuk mengetahui eksistensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam mengelola Kepegawaian di Provinsi Sulawesi Tengah.

Semoga dokumen Laporan Kinerja (LKj) ini akan memberikan manfaat dan menjadi pendorong bagi peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur yang kesemuanya bermuara kepada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Januari 2023

† **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,** *mp*



**ASRI, SH., M.Si**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19641105 199309 1 001**

## **KATA PENGANTAR**

---

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah sebagai dokumen evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan ini dimaksudkan untuk memberikan sekilas gambaran tentang hasil pelaksanaan program kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Disadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah ini masih terdapat berbagai kekurangan, namun demikian sudah memungkinkan untuk mengetahui eksistensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengemban Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam mengelola Kepegawaian di Provinsi Sulawesi Tengah.

Semoga dokumen Laporan Kinerja (LKj) ini akan memberikan manfaat dan menjadi pendorong bagi peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur yang kesemuanya bermuara kepada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

**Palu, Januari 2023**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

**ASRI, SH., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641105 199309 1 001**

## Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	1
Daftar Isi .....	2
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Cascading Kinerja.....	4
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	6
1.2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi.....	6
1.2.2 Struktur Organisasi.....	10
1.3 Isu-isu Strategis .....	13
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana .....	13
1.4.1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Golongan Ruang.....	13
1.4.2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	14
1.4.3. Keadaan PNS Pemda Sulteng Vs Penduduk Sulteng.....	15
1.4.4. Keadaan Pejabat Struktural Provinsi Sulawesi Tengah .....	15
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021.....	17
BAB II.....	18
PERENCANAAN KINERJA .....	18
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	18
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	20
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	21
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	24
2.5 Perjanjian Kinerja.....	24
BAB III.....	25
AKUNTABILITAS KINERJA .....	25
3.1 Capaian Kinerja.....	25

3.2 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran.....	33
3.3 Inovasi.....	36
3.4 Penghargaan.....	37
BAB IV.....	38
PENUTUP.....	38
4.1 Kesimpulan .....	38

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Cascading Kinerja**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 disusun berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai implementasi dari sistem akuntabilitas keuangan setiap organisasi pemerintah seperti halnya OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang kesemuanya bermuara kepada perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan menuju sebuah pemerintahan yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah ini juga dimaksudkan sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya, termasuk bagi seluruh pejabat administrator maupun fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju peningkatan pelayanan. Laporan ini menjadi bahan masukan serta umpan balik bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Kinerja ini mencakup realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.



POHON KINERJA BKD TAHUN 2022

Visi RPJMD	Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju															
Misi 2 Gubernur	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM															
Tujuan Misi 2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)															
Indikator	Indeks Reformasi birokrasi															
Sasaran Strategi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (Akuntabel, Inovatif, efisien dan transparan)															
Indikator	Indeks Profesionalitas ASN															
Tujuan Renstra	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, efisien dan transparan) melalui Manajemen ASN															
Indikator	Indeks Profesionalitas ASN															
Sasaran Renstra	Terlaksananya sistem Merit untuk mewujudkan ASN yang Profesional															
Indikator/IKU	Indeks Sistem Merit															
Program	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH															
Indikator	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan ASN dan Informasi Kepegawaian			Persentase capaian layanan mutasi kepegawaian				Persentase Pelaksanaan Pengukuran potensi dan Kompetensi ASN			Persentase pelaksanaan promosi, pengembangan dan evaluasi kinerja					
Rumus	Jumlah pelaksanaan kegiatan/jumlah target kegiatan x 100%			Jumlah SK mutasi kepegawaian (Pindah, pangkat & berkala dan pensiun) yang telah disahkan/jumlah target SK x 100%				Jumlah ASN yang diukur kompetensinya/Jumlah target ASN yang akan diukur x 100%			Jumlah pelaksanaan kegiatan/jumlah target x 100%					
Bidang	PENGADAAN, PENGHARGAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN			MUTASI KEPEGAWAIAN				UPT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI			PROMOSI, PENGEMBANGAN DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR					
Kegiatan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Mutasi dan Promosi ASN			Pengembangan Kompetensi ASN			Mutasi dan Promosi ASN		Pengembangan Kompetensi ASN		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
Indikator	Jumlah capaian persentase pelayanan Pengadaan dan Informasi Kepegawaian ASN			Jumlah capaian persentase pelayanan pemberhentian	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Mutasi			Jumlah capaian persentase layanan pengembangan Karir dan Kompetensi ASN							Jumlah ASN dinilai dan di evaluasi kinerja dan disiplinnya	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pengelolaan Asesment Center	Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Fasilitasi pengembangan karir dalam Jabatan Fungsional	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Pembinaan Disiplin ASN		
Indikator	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Asesment Center	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		
Target 2022	3 Dokumen	3 Lembaga	3 Dokumen	437 Dokumen	375 Dokumen	6000 Orang	375 ASN	13 Dokumen	200 Dokumen	4 Dokumen	800 Dokumen	11746 Dokumen	250 Dokumen	10 ASN		

## **1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

### **1.2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi**

Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi. Berdasarkan landasan-landasan tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya membantu Gubernur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan administrasi Badan di bidang pengembangan, pembinaan pegawai, mutasi, pengadaan, penghargaan dan informasi kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah



sebagian urusan pemerintahan di bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Urusan kepegawaian yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah secara umum dituangkan menjadi tugas sub-sub bidang sebagai berikut;

a. Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian”. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian
- Pelaksanaan tugas lain di bidang Kepegawaian yang diberikan oleh Gubernur.

a. Sekretaris

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Aset serta Kepegawaian dan Umum dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, umum dan kepegawaian;
- Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, umum dan Kepegawaian;
- Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, umum dan kepegawaian serta rumah tangga;
- Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, rumah tangga, umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, rumah tangga, umum dan kepegawaian;

- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b. Bidang Formasi, Pengadaan dan Informasi Kepegawaian

Bidang Formasi, Pengadaan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Formasi, Pengadaan dan Informasi Kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Formasi, Pengadaan dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang formasi, pengadaan dan informasi kepegawaian;
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Formasi pengadaan dan informasi kepegawaian;
- Penyiapan bahan pembinaan di bidang formasi, pengadaan dan informasi kepegawaian;
- Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan, kegiatan keorganisasian dan tata hubungan kerja kepengurusan Lembaga Profesi ASN;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian

c. Bidang Mutasi Kepegawaian

Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Mutasi, kepangkatan, pindah wilayah kerja, dan pemberhentian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Mutasi, kepangkatan dan pemberhentian;

- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Mutasi, kepangkatan dan pemberhentian;
- penyiapan bahan pembinaan di bidang Mutasi, kepangkatan dan pemberhentian;
- penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Mutasi, kepangkatan dan pemberhentian;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

d. Bidang Promosi, Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur

Bidang Promosi, Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan meliputi fungsi pembinaan jabatan struktural, jabatan fungsional, disiplin PNS dan Penghargaan serta Penilaian Kinerja Aparatur. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Promosi, Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jabatan struktural, jabatan fungsional, disiplin PNS dan Penghargaan serta Penilaian Kinerja Aparatur;
- penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jabatan struktural, jabatan fungsional, disiplin PNS dan Penghargaan serta Penilaian Kinerja Aparatur;
- penyiapan bahan pembinaan di bidang pembinaan jabatan struktural, jabatan fungsional, disiplin PNS dan Penghargaan serta Penilaian Kinerja Aparatur;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan;
- Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang jabatan struktural, jabatan fungsional, disiplin PNS dan Penghargaan serta Penilaian Kinerja Aparatur

e. Unit Pelaksanan Teknis Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai

UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi PNS dalam rangka pengembangan karier PNS. Dalam melaksanakan tugas tersebut Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai
- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai
- Penyiapan bahan pembinaan di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai;
- Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di UPT Penilaian dan Pengujian Kompetensi Pegawai.

f. Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

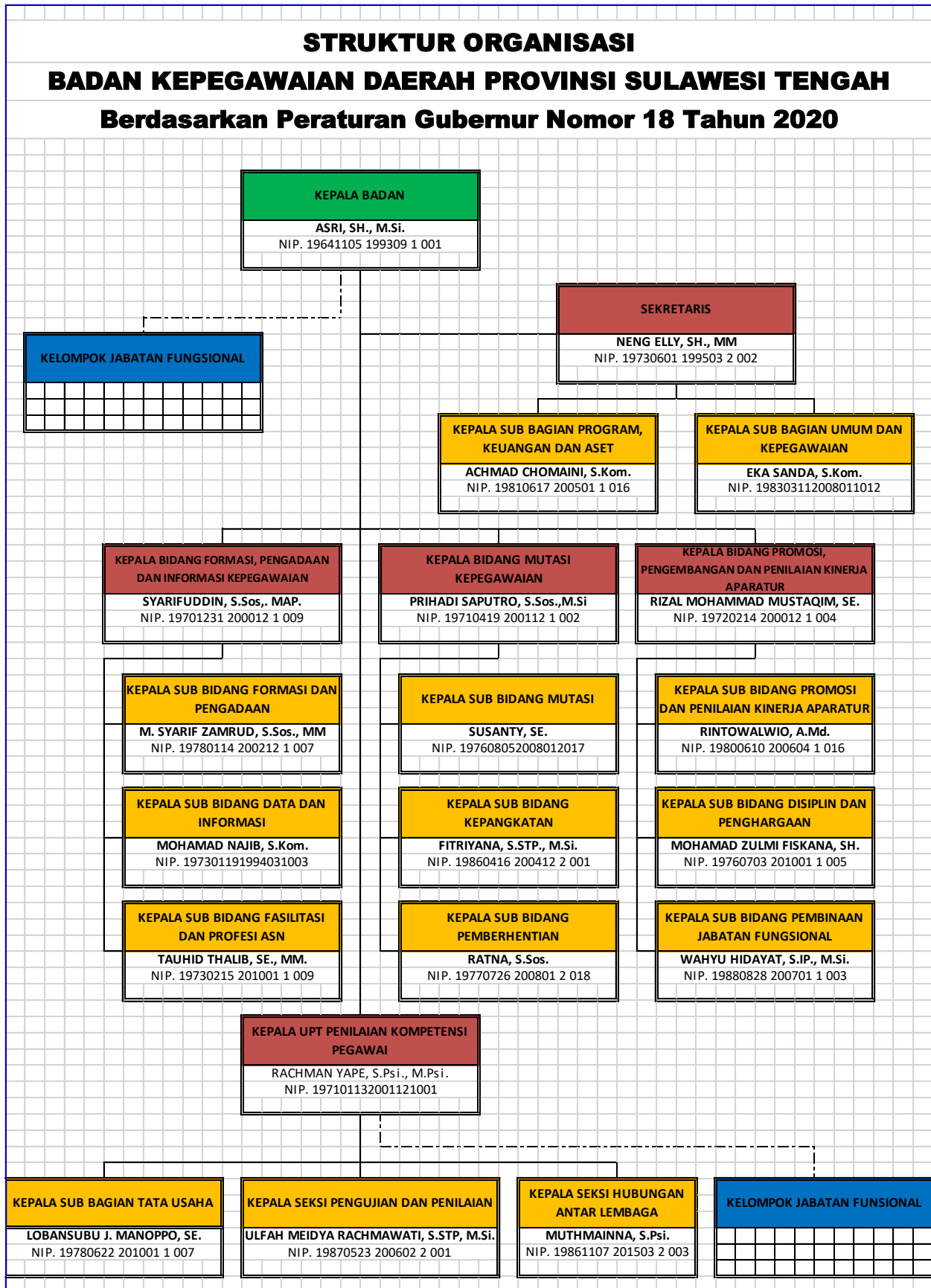
Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional, uraian tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

### **1.2.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Provinsi yang diimplementasikan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, besaran organisasi dan kotak jabatan terdiri dari seorang Kepala, seorang Sekertaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang dan seorang kepala UPT serta 2 (dua) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bidang serta 3 (tiga) Seksi dengan komposisi, sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretaris membawahi :
  - a. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- 3) Bidang Formasi, Pengadaan dan Informasi Kepegawaian, membawahi:
  - a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
  - c. Sub Bidang Fasilitasi dan Profesi ASN.
- 4) Bidang Mutasi, membawahi :
  - a. Sub Bidang Mutasi;
  - b. Sub Bidang Kepangkatan; dan
  - c. Sub Bidang Pemberhentian.
- 5) Bidang Promosi, Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur, membawahi :
  - a. Sub Bidang Promosi dan Penilaian Kinerja Aparatur;
  - b. Sub Bidang Disiplin dan Penghargaan; dan
  - c. Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional
- 6) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut gambar Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;





### 1.3 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis di bidang kepegawaian hingga saat ini adalah masyarakat masih memandang bahwa sebagian besar pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut aparatur sipil negara (ASN) masih banyak yang tidak kompeten (*incompetence*) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya terutama yang terkait dengan pelayanan publik. Keberadaan atau pendistribusian ASN belum merata dan belum sesuai dengan formasi dan kebutuhan dan hanya terkonsentrasi di ibukota atau di Perangkat Daerah yang memiliki alokasi anggaran cukup besar saja, kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki (*mismatch*), tidak diberdayakan secara optimal (*under employment*), dan kinerjanya rendah (*under performance*). Sehingga persepsi masyarakat terhadap kondisi ASN tersebut adalah wajar mengingat sampai dengan saat ini sistem pembinaan ASN belum menggunakan pendekatan manajemen pengembangan sumber daya aparatur yang dapat mewujudkan ASN sebagaimana harapan masyarakat.

### 1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana

Dengan melihat kondisi dan beban tugas serta tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tersebut di atas maka perlu disampaikan kondisi Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulawesi Tengah keadaan pegawai sampai dengan bulan desember Tahun 2022 berjumlah 11.188 PNS dengan rincian sebagai berikut :

#### 1.4.1. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Golongan Ruang

No	Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	I/a	2	0	2
2	I/b	6	1	7
3	I/c	16	2	18
4	I/d	16	2	18

5	II/a	74	28	102
6	II/b	230	110	340
7	II/c	202	138	340
8	II/d	396	176	572
9	III/a	507	480	987
10	III/b	680	768	1.448
11	III/c	624	862	1.486
12	III/d	1.037	1.586	2.623
13	IV/a	774	989	1.763
14	IV/b	680	661	1.341
15	IV/c	53	48	101
16	IV/d	22	15	37
17	IV/e	0	3	3
	Total	5.319	5.869	11.188 Orang

#### 1.4.2 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	SD	25	2	27
2	SMP	27	5	32
3	SMA/SMK	1.024	508	1.532
4	D.I	7	5	12
5	D.II	9	15	24
6	D.III	191	449	640
7	Strata I (S1)/D.IV	3.012	3.885	6.897
8	Strata II (S2)	996	989	1.985
9	Strata III (S3)	28	11	39
	Total	5.319	5.869	11.188 Orang

**1.4.3. Keadaan PNS Pemda Sulteng Vs Penduduk Sulteng**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk	PNS	% PNSD terhadap Penduduk
1	Kabupaten Banggai	366.220	7.294	1,99%
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	121.680	3.329	2,74%
3	Kabupaten Banggai Laut	70.870	2.247	3,17%
4	Kabupaten Parigi Moutong	146.630	3.880	2,65%
5	Kabupaten Donggala	302.970	5.884	1,94%
6	Kabupaten Morowali	167.910	3.440	2,05%
7	Kabupaten Morowali Utara	122.240	3.725	3,05%
8	Kabupaten Parigi Moutong	443.170	6.887	1,55%
9	Kabupaten Poso	248.350	6.306	2,54%
10	Kabupaten Sigi	261.680	5.221	2,00%
11	Kabupaten Tojo Una-una	166.340	4.076	2,45%
12	Kabupaten Toli-toli	226.800	5.070	2,24%
13	Kota Palu	377.030	5.930	1,57%
	Total	3.021.890	63.289	2,09%

\*) Jumlah Penduduk bersumber dari Badan Pusat Statistik

**1.4.4. Keadaan Pejabat Struktural Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Jenjang Jabatan	Formasi	Terisi		Jumlah
			Pria	Wanita	
1	Eselon I.b	1	0	0	0
2	Eselon II.a	43	26	10	36
3	Eselon II.b	10	10	0	10
4	Eselon III.a	211	122	77	199
5	Eselon III.b	90	59	31	90
6	Eselon IV.a	475	246	211	457
7	Eselon IV.b	2	1	1	2
	Total	832	464	330	794 Orang

\*) Jumlah Jabatan Non KTU SMA/SMK

Dalam rangka pendayagunaan aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 90 orang personil berstatus Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 7 orang golongan IV, 67 orang golongan III, 16 orang golongan II. Apabila dilihat dari segi kualitas Pendidikan Tinggi (S1-S3) 65 Orang, Diploma 5 orang, Pendidikan Dasar (SD-SMA) 20 orang, kualitas SDM Aparatur sudah memadai namun masih perlu ditingkatkan dengan mengikuti Pendidikan Formal dan Diklat Substantif serta peningkatan motivasi untuk meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Dari sisi sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas bahwa sampai saat ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki beberapa gedung dengan luas bangunan dan sarana pendukung lainnya yang cukup memadai, namun sejalan dengan tuntutan dan beban tugas yang semakin besar sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara No 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 untuk tahap II, maka untuk urusan penilaian kompetensi aparatur harus juga ditunjang dengan sarana prasarana pendukung yang representatif sesuai dengan tuntutan peraturan dan kemajuan teknologi yang ada.

Sejalan dengan itu dapat dirasakan bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur saat ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas Pelayanan Kepegawaian, hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan antara lain:

1. Jumlah PNS yang tidak diikuti dengan kualitas sumberdaya aparatur yang tergambar pada pemenuhan standar kompetensi jabatan;
2. Belum terlaksana secara optimal mekanisme pembinaan dan pelayanan

urusan kepegawaian secara tepat waktu, berhasil dan berdaya guna sesuai dengan SOP pelayanan;

3. Belum optimalnya penerapan disiplin PNS;
4. Distribusi dan alokasi PNS secara kualitas dan kuantitas belum merata;
5. Belum optimalnya sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi.

### **1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

Beberapa hal telah dilakukan berdasarkan hasil review Sakip tahun 2021 pada pelaksanaan kegiatan tahun 2022 yaitu:

- a. Perbaikan dan penerbitan renstra 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan RPJMD tahun 2021-2026 dan peraturan perundang-undangan baik Permendagri Nomor 86 tahun 2017 maupun Kepmendagri 050 5889 Tahun 2021;
- b. Melakukan review terhadap capaian IKU Organisasi secara berkala sehingga peningkatan nilai indeks terlihat meningkat walaupun tidak signifikan dan masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaiannya;
- c. Telah dilakukan evaluasi kinerja Bersama OPD terkait semisal Bappeda terkait capaian target kinerja dan hambatannya sehingga didapati beberapa target kinerja yang perlu diperhatikan dukungan anggarannya sehingga target kerjanya dapat tercapai;
- d. Rencana Aksi telah dilakukan pemantauan oleh Bappeda maupun Badan Kepegawaian Daerah sendiri.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

##### **a. Visi dan Misi**

Kerangka Rencana Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibangun pada periode 2021 – 2026 sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun sepenuhnya untuk mendukung terwujudnya Visi Gubernur Sulawesi Tengah Yaitu **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”** dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spritual Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM;
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan alam, Antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan;
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi Bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara Sistematis dan Digital;
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) agar terjadi



Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas;

Kesesuaian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Misi Provinsi Sulawesi Tengah adalah pada **Misi-2 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.** Dalam mendukung hal tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan akuntabilitas publik, transparansi dan memperbaiki manajemen personalia Pemerintah Daerah dalam kerangka mengakses pembangunan daerah melalui tatanan otonomi. Maka untuk mencapai visi dan misi yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam jangkauan ke depan, maka dipandang perlu untuk menjabarkan lebih lanjut dalam suatu tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang menjadi pedoman penyelenggaraan program yang mengacu kepada tugas dan kewenangan BKD Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.1

## Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>						
	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, efisien dan transparan) melalui Manajemen ASN		1 Indeks Profesionalitas ASN	61-70	71-80	71-80	81-90	81-90
		Terlaksananya sistem Merit untuk mewujudkan ASN yang Profesional	2 Indeks Sistem Merit	250	275	300	325	350

## **b. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Misi di atas adalah Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, efisien dan transparan) melalui Manajemen ASN dengan indikator keberhasilan capaian Indeks Profesionalitas ASN

## **c. Sasaran**

Adapun sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Terlaksananya sistem Merit untuk mewujudkan ASN yang Profesional dengan indikator keberhasilan adalah capaian pelaksanaan sistem merit dengan nilai Indeks Sistem Merit bernilai baik.

## **2.2 Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah menetapkan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN
- b. Melaksanakan pola karir ASN
- c. Melaksanakan reward and punishment terhadap ASN

Adapun arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Road Map penerapan Sistem Merit
- b. Menyiapkan database kepegawaian yang akurat
- c. Menyiapkan Aplikasi penerapan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur
- d. Menyusun regulasi tentang pola karir ASN
- e. Menyiapkan aplikasi penerapan reward and punishment.

Hubungan antara Tujuan, sasaran dengan strategi dan arah kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Strategi dan Arah Kebijakan

<b>Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju</b>						
<b>Misi 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spritual Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM</b>						
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>		<b>Arah Kebijakan</b>	
Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, efisien dan transparan) melalui Manajemen ASN	1.1	Terlaksananya sistem Merit untuk mewujudkan ASN yang Profesional	1.1.1	Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN	1.1.1.1	Menyiapkan Road Map penerapan Sistem Merit
					1.1.1.2	Menyiapkan database kepegawaian yang akurat
					1.1.1.3	Menyiapkan Aplikasi penerapan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur
			1.1.2	Melaksanakan pola karir ASN;	1.1.2.1	Menyusun regulasi tentang pola karir ASN
			1.1.3	Melaksanakan reward and punishment terhadap ASN;	1.1.3.1	Menyiapkan aplikasi penerapan reward and punishment

### 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan mendukung pencapaian indikator tujuan dan sasaran, terdapat dua program yang menjadi tanggungjawab Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yakni Program yang terkait langsung dengan Pencapaian Sasaran dan Program yang mendukung Pencapaian Sasaran. Dengan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3a Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM (outcome) dan KEGIATAN (output)	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Bertambah/ Berkurang	KET		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							8,862,201,500	8,862,201,500			
Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, efisien dan transparan) melalui Manajemen ASN	Terlaksananya sistem Merit untuk mewujudkan ASN yang Profesional		Indeks Profesionalitas ASN	61-70		61-70		-			
			Indeks Sistem Merit	250		250		-			
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan ASN dan Informasi Kepegawaian	100%		100%	1,704,121,475	1,704,121,475			
			Persentase capaian layanan mutasi kepegawaian	100%		100%	576,827,500	576,827,500			
			Persentase Pelaksanaan Pengukuran potensi dan Kompetensi ASN	100%		100%	836,805,900	836,805,900			
			Persentase pelaksanaan promosi, pengembangan dan evaluasi kinerja	100%		100%	1,313,345,875	1,313,345,875			
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah capaian persentase pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	1,221,370,225	100%	1,848,797,200	627,426,975		
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3	554,719,675	3	1,035,590,575	480,870,900		
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	420	141,650,750	437	144,675,725	3,024,975		
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	349,999,875	3	449,500,000	99,500,125		
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3	174,999,925	3	219,030,900	44,030,975		
			Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Mutasi dan Promosi ASN	6575	717,636,225	6575	1,136,511,025	418,874,800		
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	350	80,055,525	375	106,921,250	26,865,725		
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5000	314,069,700	6000	325,230,525	11,160,825		
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	300	323,511,000	200	704,359,250	380,848,250		
			Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah capaian persentase layanan pengembangan Karir dan Kompetensi ASN	100%	724,991,950	100%	1,101,314,850	376,322,900		
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200	314,028,000	375	419,424,475	105,396,475	UPT	
			Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	12	115,702,000	13	417,381,425	301,679,425	UPT	
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	10	209,268,000	10	135,888,000	(73,380,000)		
			Fasilitasi pengembangan karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	800	85,993,950	800	128,620,950	42,627,000		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN dinilai dan di evaluasi kinerja dan disiplinnya	11746	292,785,675	11746	344,477,675	51,692,000				
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	11486	114,033,000	11486	146,879,000	146,879,000.00				
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	300	62,633,675	250	72,056,675	9,423,000				
	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	11	116,119,000	10	125,542,000	9,423,000				

Tabel 2.3b Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN, PROGRAM (outcome) dan KEGIATAN (output)	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Bertambah/ Berkurang	KET	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, efisien dan transparan) melalui Manajemen ASN	Terlaksananya sistem Merit untuk mewujudkan ASN yang Profesional		Indeks Profesionalitas ASN	61-70		61-70	14,564,027,623	14,564,027,623	-	
			Indeks Sistem Merit	250		250			-	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64,50	13,120,792,013	64,50	14,564,027,623	1,443,235,610	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73	276,114,350	73	440,757,325	164,642,975	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	250,467,375	7	418,552,450	168,085,075	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	25,646,975	4	22,204,875	(3,442,100)	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Keuangan	95%	10,080,633,423	95%	10,103,865,873	23,232,450	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	9,824,576,848	95	9,847,129,298	22,552,450	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120	224,454,575	180	225,134,575	680,000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	21,602,175	1	21,602,175	-	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	9,999,825	4	9,999,825	-	
			Administrasi Barang milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	30,129,650	1	71,416,575	41,286,925	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	30,129,650	1	71,416,575	41,286,925	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	9	14,523,000	9	72,492,450	57,969,450	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	14,523,000	9	72,492,450	57,969,450	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	3	378,918,900	3	569,805,900	190,887,000	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	15,017,900	1	13,037,900	(1,980,000)	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	186,689,825	1	186,689,825	-	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	177,211,175	12	370,078,175	192,867,000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	194,045,700	2	1,129,236,610	935,190,910	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	2	971,000,000	971,000,000	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17	194,045,700	15	158,236,610	(35,809,090)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	1,494,376,990	80	1,488,692,890	(5,684,100)	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	407,085,440	4	403,576,840	(3,508,600)			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	133,618,000	4	133,618,000	-	UPT		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	953,673,550	4	951,498,050	(2,175,500)			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	4	652,050,000	4	687,760,000	35,710,000			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41	451,850,000	41	454,850,000	3,000,000			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	70,000,000	5	79,000,000	9,000,000			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	151	130,200,000	180	153,910,000	23,710,000			

## 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Perangkat Daerah, dengan ini Badan Kepegawaian Daerah menetapkan indikator kinerja utama dengan formula sebagai berikut:

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Formula Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Metodologi
1.	Terlaksananya sistem Merit untuk mewujudkan ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit	Hasil penilaian sistem merit/400	skor penilaian atas kriteria indikator sistem merit dibagi total bobot kriteria indikator sistem merit	Hasil Penilaian Tim Penilai Sistem Merit

## 2.5 Perjanjian Kinerja

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis tahun 2021 - 2026, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Dengan Rencana Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala BKD dan Gubernur Sulawesi Tengah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah. Perjanjian Kinerja tersebut dijabarkan ke dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya sistem Merit untuk mewujudkan ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit	Indeks	250
2.	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	64.5



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja**

Dari penetapan target indikator tujuan dan sasaran yang tercapai pada tahun 2022, secara umum masih jauh dari kondisi yang diharapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan masyarakat. Namun pada indikator kinerja yang digunakan seluruhnya pada tingkat *outcome* (hasil) maupun *output* (keluaran) capaiannya dapat dikatakan cukup memuaskan. Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengukur capaian kinerja untuk semua kegiatan/program yang sumber dananya dari APBD berupa belanja pegawai dan belanja barang jasa serta belanja modal lainnya.

Pengukuran kinerja mencakup penetapan kinerja dan penetapan pencapaian rincian kinerja yang berisi indikator kinerja yang dipakai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan. Metode pembandingan capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari satu (1) indikator sasaran yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam empat (4) indikator program Teknis dan satu (1) indikator program penunjang urusan pemerintahan daerah, yang mana hampir kesemuanya telah mencapai kinerja yang diharapkan. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran indikator keberhasilannya sebagian besar

dapat diwujudkan lebih dari 90%. Hal ini terlihat dari capaian sasaran yang diukur dengan tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome.

Tabel 3.1a Perbandingan antara Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, efisien dan transparan) melalui Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	61-70				
2	Terlaksananya sistem Merit untuk mewujudkan ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit	250				
	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan ASN dan Informasi Kepegawaian	100%	1,704,121,475	1,399,110,853	82	
		Persentase capaian layanan mutasi kepegawaian	100%	576,827,500	565,656,480	98	
		Persentase Pelaksanaan Pengukuran potensi dan Kompetensi ASN	100%	836,805,900	788,480,074	94	
		Persentase pelaksanaan promosi, pengembangan dan evaluasi kinerja	100%	1,313,345,875	1,124,544,635	86	
	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	Jumlah capaian persentase pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	1,848,797,200	1,542,865,240	83	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3	1,035,590,575	730,621,680	71	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	437	144,675,725	143,754,387	99	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	449,500,000	449,459,853	100	
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3	219,030,900	219,029,320	100	
	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan Mutasi dan Promosi ASN	6575	1,136,511,025	989,561,053	87	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	375	106,921,250	101,932,270	95	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6000	325,230,525	319,969,823	98	
	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200	704,359,250	567,658,960	81	
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	Jumlah capaian persentase layanan pengembangan Karir dan Kompetensi ASN	100%	1,101,314,850	1,033,409,826	94	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	375	419,424,475	402,289,490	96	
	Pengelolaan Aassessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	13	417,381,425	386,190,584	93	

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	10	135,888,000	<b>134,688,000</b>	99
Fasilitasi pengembangan karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	800	128,620,950	<b>110,241,752</b>	86
<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Jumlah ASN dinilai dan di evaluasi kinerja dan disiplinnya</b>	<b>11746</b>	<b>344,477,675</b>	<b>311,955,923</b>	91
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	11486	146,879,000	<b>130,544,640</b>	89
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250	72,056,675	<b>71,684,915</b>	99
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10	125,542,000	<b>109,726,368</b>	87
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</b>	<b>64,50</b>	<b>14,564,027,623</b>	<b>13,740,044,326</b>	94
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>73</b>	<b>440,757,325</b>	<b>435,687,687</b>	99
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	418,552,450	<b>413,482,812</b>	99
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	22,204,875	<b>22,204,875</b>	100
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Realisasi Keuangan</b>	<b>95%</b>	<b>10,103,865,873</b>	<b>9,429,044,669</b>	93
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95	9,847,129,298	<b>9,172,758,094</b>	93
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180	225,134,575	<b>224,684,575</b>	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	21,602,175	<b>21,602,175</b>	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	9,999,825	<b>9,999,825</b>	100
<b>Administrasi Barang milik Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1</b>	<b>71,416,575</b>	<b>65,416,435</b>	92
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	71,416,575	<b>65,416,435</b>	92
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>9</b>	<b>72,492,450</b>	<b>71,394,910</b>	98
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9	72,492,450	<b>71,394,910</b>	98
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian</b>	<b>3</b>	<b>569,805,900</b>	<b>565,135,190</b>	99
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	13,037,900	<b>12,997,000</b>	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	186,689,825	<b>183,584,325</b>	98
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	370,078,175	<b>368,553,865</b>	100

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2</b>	<b>1,129,236,610</b>	<b>1,055,953,265</b>	<b>94</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	971,000,000	<b>926,000,000</b>	95	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	158,236,610	<b>129,953,265</b>	82	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>80</b>	<b>1,488,692,890</b>	<b>1,449,217,770</b>	<b>97</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	403,576,840	<b>384,541,459</b>	95	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	133,618,000	<b>128,184,307</b>	96	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	951,498,050	<b>936,492,004</b>	98	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4</b>	<b>687,760,000</b>	<b>668,194,400</b>	<b>97</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41	454,850,000	<b>437,574,400</b>	96	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	79,000,000	<b>78,080,000</b>	99	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180	153,910,000	<b>152,540,000</b>	99	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-		

Hasil analisis capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan sasaran strategi yakni, **Terlaksananya sistem Merit untuk mewujudkan ASN yang Profesional** dengan capaian Indeks Sistem Merit tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian dari KemenPan-RB mengalami peningkatan dari tahun lalu yaitu 172,5 Indeks yang keberhasilannya dapat diukur dengan beberapa indikator program sebagai berikut:

1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan ASN dan Informasi Kepegawaian;
2. Persentase capaian layanan mutasi kepegawaian;

3. Persentase Pelaksanaan Pengukuran potensi dan Kompetensi ASN;
4. Persentase pelaksanaan promosi, pengembangan dan evaluasi kinerja.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022 telah melaksanakan indikator-indikator kinerja tersebut didukung dengan indikator-indikator program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai nomenklatur Bidang dengan penjelasan sebagai berikut :

#### **Indikator 1**

**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan ASN dan Informasi Kepegawaian** diukur dengan pelaksanaan beberapa kegiatan berikut :

1. Tersusunnya formasi CPNS yang akurat dan terlaksananya seleksi CPNS dan PPPK yang akuntabel yaitu dengan menyusun dokumen formasi kebutuhan PNS dan PPPK Provinsi sesuai kompetensinya dan pelaksanaan Pengadaan CPNS dan PPPK melalui sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
2. Terjaminnya hak, perlindungan dan penghargaan PNS dalam usaha untuk mencapai target indikator kinerja ini Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Kegiatan Persemayaman, Cuti dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan Korpri, Kegiatan Peringatan HUT Korpri Upacara dan Rapat Kerja, dan Kegiatan Perayaan Natal Korpri Melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN;
3. Sistem informasi kepegawaian yang cepat dan akurat dicapai dengan menerbitkan informasi berupa Buletin Kepegawaian, Buku statistik, Buku Profil Jabatan Pimpinan Tinggi, Buku Profil Jabatan Fungsional dan Buku Profil Pejabat Struktural BKD Prov. Sulteng dan Website BKD melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian.

Capaian Indikator Program ini pada tahun 2022 mencapai 122 %.

#### **Indikator 2**

**Persentase capaian layanan mutasi kepegawaian** dalam pencapaiannya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 telah

berupaya untuk mewujudkan indikator kinerja capaian layanan mutasi kepegawaian melalui sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Mutasi ASN
2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Dari indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan indikator ini, capaiannya sangat tinggi sebesar 142,1 %, namun dalam proses pelayanan masih terdapat kendala dalam hal ketepatan waktu penerbitan SK belum sesuai SOP. Diperlukan strategi yang tepat agar SOP pelayanan administrasi kepegawaian dapat lebih optimal dengan jalan meningkatkan kapasitas pengelolaan mutasi kepegawaian.

### **Indikator 3**

**Persentase Pelaksanaan Pengukuran Potensi dan Kompetensi ASN** dapat diukur dengan dua (2) indikator yakni, 1. Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya, 2. Jumlah Dokumen Pengelolaan Asesment Center. Dalam mencapai indikator tersebut UPT Penilaian Kompetensi Kinerja Aparatur melaksanakan tugas dan fungsinya melalui kegiatan-kegiatan, yakni Peningkatan kapasitas aparatur dan Pengelolaan Asesment Center yang pada tahun 2022 ini hanya mencapai 70,8%.

### **Indikator 4**

**Persentase pelaksanaan promosi, pengembangan dan evaluasi kinerja** dapat diukur dengan beberapa indikator kinerja (output) sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Promosi ASN;
2. Jumlah dokumen hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang dikelola;
3. Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional;
4. Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5. Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa;
6. Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan.



Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun anggaran 2022 telah berupaya melaksanakan indikator-indikator kinerja outcome/output. Berubahnya nomenklatur dan adanya RPJMD baru menjadikan beberapa target indikator kegiatan berubah atau baru yang target kinerja disesuaikan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Untuk capaian indikator-indikator outcome/output dicapai melalui Sub-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Promosi ASN;
2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3. Fasilitasi pengembangan karir dalam Jabatan Fungsional;
4. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
5. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai;
6. Pembinaan Disiplin ASN.

Dari 6 indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengelolaan promosi ASN mencapai realisasinya melebihi target dengan capaian rata-rata diatas 89,4 % dengan kategori tinggi.

Tabel 3.1b Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, efisien dan transparan) melalui Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN							60	36,97	61,62	61	38,25	62,70
2	Terlaksananya sistem Merit untuk mewujudkan ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit							250	168	67,20	275	175	63,64

Secara umum dapat kami sampaikan bahwa apa yang kami sajikan diatas merupakan indikator-indikator yang terdapat pada dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang secara tidak langsung tidak bersesuaian dengan indikator tujuan sasaran renstra periode 2016-2021. Pada tahun 2021 program kegiatan dan sub kegiatan yang telah diatur oleh Kementerian Dalam Negeri melalui

Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan juga Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Namun walaupun demikian kami tetap berupaya menyajikan Laporan Kinerja ini dengan data yang maksimal.

Tabel 3.1c Tujuan dan Sasaran serta Target Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Realisasi Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun						Realisasi Kinerja		Keterangan
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang berkualitas (Akuntabel, Inovatif, efisien dan transparan) melalui Manajemen ASN		Indeks Profesionalitas ASN	60-61	61-70	71-80	71-80	81-90	81-90	36,97	38,25	
		Terlaksananya sistem Merit untuk mewujudkan ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit	225	250	275	300	325	350	168	175	

Tabel 3.1d Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1					

Dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah tidak memiliki program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan program nasional, sehingga tabel perbandingan capaian dengan standar nasional tidak dapat kami sajikan.

3.1e Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Adanya sistem aplikasi terbaru yaitu SiASN yang menggantikan aplikasi SAPK sehingga menyebabkan masih belum dapat tersinkronkan item-item penilaian yang menunjang tercapainya indikator Indeks Profesionalitas ASN

hal ini menjadi salah satu penyebab menurunnya capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2022, namun belum tersedianya aplikasi yang terintegrasi antar bidang dan antar OPD juga dapat dikatakan masih menjadi penyebab utama belum tercapainya Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana yang diharapkan. Sehingga pada akhir tahun 2022 telah mulai dilakukan peninjauan untuk melakukan kerjasama dalam pemanfaatan aplikasi dengan pemerintah provinsi Jawa Barat, yang pada awal tahun 2023 ini telah dilakukan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama.

### 3.1f Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Secara keseluruhan program dan kegiatan dapat menunjang tercapainya indikator tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah namun belum terpetakannya SDM aparatur dan belum adanya aplikasi yang terintegrasi antar bidang pada Badan Kepegawaian Daerah dan antar perangkat daerah, sehingga menyebabkan belum bisa dipecahkan apa yang menjadi permasalahan dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki capaian target indikator yang ada selama ini.

## **3.2 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran**

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Badan Kepegawaian Daerah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 memiliki capaian anggaran program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2a Tingkat Efisiensi Anggaran

No.	Indikator Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3	3	100%	1,035,590,575	730,621,680	71%	29.45
2	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	437	436	100%	162,721,875	143,754,387	88%	11.45
3	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	5	167%	449,500,000	449,459,853	100%	40.01
4	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3	3	100%	345,464,650	219,029,320	63%	36.60
5	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	375	700	187%	142,885,875	101,932,270	71%	61.78
6	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6000	8799	147%	336,006,650	319,969,823	95%	35.06
7	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	200	224	112%	704,359,250	567,658,960	81%	28.04
8	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	375	261	70%	359,678,798	203,474,490	57%	18.72
9	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	13	14	108%	267,320,378	190,518,909	71%	33.82
10	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	10	4	40%	461,755,000	134,688,000	29%	27.08
11	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	800	547	68%	165,043,808	110,241,752	67%	2.31
12	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	11486	9935	86%	146,879,000	130,544,640	89%	-2.75
13	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	250	104	42%	72,056,675	71,684,915	99%	-139.14
14	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10	9	90%	125,542,000	109,726,368	87%	2.89

Tabel 3.2b Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>14,564,027,623</b>	<b>13,740,044,326</b>	94
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>440,757,325</b>	<b>435,687,687</b>	99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	418,552,450	413,482,812	99
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,204,875	22,204,875	100
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10,103,865,873</b>	<b>9,429,044,669</b>	93
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,847,129,298	9,172,758,094	93
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	225,134,575	224,684,575	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21,602,175	21,602,175	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9,999,825	9,999,825	100
	<b>Administrasi Barang milik Daerah</b>	<b>71,416,575</b>	<b>65,416,435</b>	92
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	71,416,575	65,416,435	92
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>72,492,450</b>	<b>71,394,910</b>	98
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72,492,450	71,394,910	98
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>569,805,900</b>	<b>565,135,190</b>	99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,037,900	12,997,000	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	186,689,825	183,584,325	98
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	370,078,175	368,553,865	100
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,129,236,610</b>	<b>1,055,953,265</b>	94
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	971,000,000	926,000,000	95
	Pengadaan Mebel	-	-	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158,236,610	129,953,265	82
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,488,692,890</b>	<b>1,449,217,770</b>	97
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	403,576,840	384,541,459	95
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	951,498,050	936,492,004	98
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133,618,000	128,184,307	96
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>687,760,000</b>	<b>668,194,400.00</b>	97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	454,850,000	437,574,400	96
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79,000,000	78,080,000	99
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153,910,000	152,540,000	99
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0

2	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>4,431,100,750</b>	<b>3,877,792,042</b>	88
	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1,848,797,200</b>	<b>1,542,865,240</b>	83
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1,035,590,575	730,621,680	71
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	144,675,725	143,754,387	99
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	449,500,000	449,459,853	100
	Pengelolaan Data Kepegawaian	219,030,900	219,029,320	100
	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>1,136,511,025</b>	<b>989,561,053</b>	87
	Pengelolaan Mutasi ASN	106,921,250	101,932,270	95
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	325,230,525	319,969,823	98
	Pengelolaan Promosi ASN	704,359,250	567,658,960	81
	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>1,101,314,850</b>	<b>1,033,409,826</b>	94
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	419,424,475	402,289,490	96
	Pengelolaan Asessment Centar	417,381,425	386,190,584	93
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	135,888,000	134,688,000	99
	Fasilitasi pengembangan karir dalam Jabatan Fungsional	128,620,950	110,241,752	86
	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>344,477,675</b>	<b>311,955,923</b>	91
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	146,879,000	130,544,640	89
	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	72,056,675	71,684,915	99
	Pembinaan Disiplin ASN	125,542,000	109,726,368	87
	<b>Total</b>	<b>18,995,128,373</b>	<b>17,617,836,368</b>	<b>93</b>

Belanja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja daerah untuk periode 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 17.617.836.368,00 atau 93% dari anggaran belanja perubahan sebesar Rp. 18.995.128.383,00. Realisasi belanja sebesar Rp. 17.617.836.368,00 terdiri dari:

No	Uraian Belanja	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Pegawai	Rp. 9.938.049.298,00	Rp. 9.263.678.094,00
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 7.927.842.465,00	Rp. 7.298.205.009,00
3	Belanja Modal	Rp. 1.129.236.610,00	Rp. 1.055.953.265,00

### 3.3 Inovasi

Pada tahun 2022 telah dilakukan kerjasama dengan lembaga pusat dalam upaya mempercepat pemetaan Kompetensi PNS melalui pengukuran kompetensi dengan virtual assessment, sehingga mempersingkat proses pelaksanaan karena pelaksanaannya telah menggunakan aplikasi dan dapat kami sampaikan pula bahwa sebagai bentuk antisipasi pelaksanaan

kedepannya pada tahun 2022 pula, UPT Penilaian Kompetensi Pegawai telah menyiapkan aplikasi yang dapat dikembangkan menjadi alat pengukuran virtual assessment.

### **3.4 Penghargaan**

Penghargaan yang didapatkan oleh Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2022 adalah :

- a. Pada Rakornis Kepegawaian Se-wilayah Kerja Kanreg IV BKN Makassar mendapat peringkat terbaik pertama (1) Tingkat Provinsi kategori Proses Kenaikan Pangkat (KP) Se-Kanreg IV BKN Makassar.
- b. Penghargaan BKN Award 2022 peringkat kedua (2) atas Capaian dalam Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian;
- c. Penghargaan BKN Award 2022 peringkat ketiga (3) atas Capaian dalam penerapan pemanfaatan Data, Sistem Informasi dan CAT;

Dengan adanya penghargaan-penghargaan tersebut dari pemerintah pusat ini menjadi motivasi dan semangat kerja yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengelolaan administrasi dibidang Kepegawaian.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Di era reformasi birokrasi serta semakin kompleksnya tuntutan masyarakat, isu aktual yang dihadapi adalah peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Dengan demikian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah harus segera membenahi hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian antara struktur dan tugas fungsi organisasi dengan program kegiatan yang telah diatur Kemendagri;
2. Produktivitas dan motivasi kerja aparatur;
3. Pembinaan, pengembangan, dan disiplin pegawai;
4. Keakuratan database kepegawaian;
5. Ketersediaan anggaran bagi penyusunan program/kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Rencana Kerja pada tahun berikutnya.